

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS AUDIT
ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Disusun Oleh:

NAMA : SAFWATULLAH HARI PRASETYO
NPM : 1863002185
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister
Terapan Administrasi Publik (M.Tr.Ap)



**POLITEKNIK
STIA LAN**
J A K A R T A

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2022**

**PROGRAM STUDI MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Safwatullah Hari Prasetyo
NPM : 1863002185
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit Atas Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : *The Affecting Factors of the Quality of Audit on the Financial Statements of the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia*

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan dalam bimbingan Tesis

DOSEN PEMBIMBING



Dr. R. Luki Karunia, MA.

**PROGRAM STUDI MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

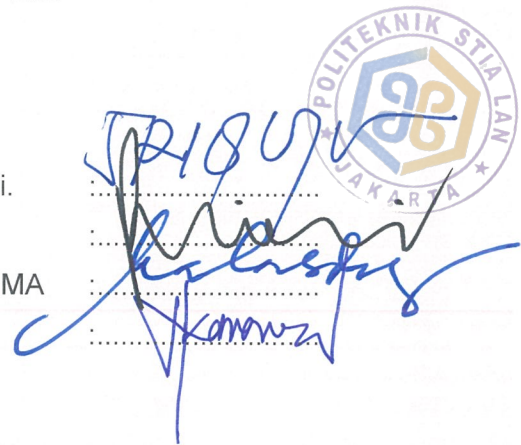
Nama : Safwatullah Hari Prasetyo
NPM : 1863002185
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Faktor-faktor yang mempengaruhi
Kualitas Audit Atas Laporan Keuangan
Kementerian Pertahanan RI

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister Terapan
Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga
Administrasi Negara, Pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 23 Juni 2022
Pukul : 14.30 – 16.00 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS:

Ketua Sidang : Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si.
Sekretaris : Dr. Ridwan Rajab, M.Si
Anggota : Dr. Mala Sondang Silitonga, MA
Pembimbing : Dr. R. Luki Karunia, MA.



The image shows the official stamp of Politeknik STIA LAN Jakarta, which is a circular emblem with the institution's name and a central logo. Overlaid on the stamp are several handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names of the examiners listed in the text to the left.

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Safwatullah Hari Prasetyo
NPM : 1863002185
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi: Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Menyatakan bahwa tesis dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit Atas Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia” secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dirujuk secara langsung maupun yang dirujuk secara tidak langsung telah peneliti nyatakan dengan benar.

Jakarta, Juni 2022
Yang Membuat Pernyataan,


(Safwatullah Hari Prasetyo)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah yang maha kuasa atas kemurahan dan keridooannya sehingga rangkaian tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat beserta salam yang tak pernah terputus pada junjungan kita nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya yang telah memberikan pencerahan kepada alam semesta.

Alhamdulillah, Tesis dengan Judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit Atas Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia” yang merupakan suatu syarat dalam mencapai gelar Magister Terapan Administrasi Publik pada Program Pasca Sarjana STIA LAN Jakarta.

Melalui tesis ini, peneliti menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibunda Valentina Tasminah dan bapak Valentinus Harjoto yang telah mencurahkan kasih sayang yang tak pernah pupus, juga tak lupa rasa terimakasih ini saya sampaikan kepada istriku Firda serta anak-anakku Callysta Raissa Putri dan Athalia Putri Ramadhani, yang telah mendukung dan memberikan semangat selama kuliah dan pada akhirnya menyelesaikan tesis ini. Begitu pula pujian dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya peneliti haturkan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA, selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.
2. Bapak Dr. Asropi, S.Ip., M.Si, selaku Ketua Prodi APN Magister Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta.
3. Bapak Dr. R. Luki Karunia, SE.Ak., MA, selaku Dosen Pembimbing yang terus memberikan dukungan dan arahnya dalam penyelesaian tesis ini.
4. Para Dosen Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah mengajar dan memberikan pencerahan terutama dalam bidang administasi negara.
5. Serta seluruh Staf BAK yang selalu membantu kelancaran perkuliahan.

6. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan, Para Inspektur beserta jajaran yang telah mengizinkan melakukan penelitian dan membantu dalam proses penelitian.
7. Para Informan penelitian yang bersedia menyediakan waktunya untuk wawancara.
8. Para Auditor Madya dan Auditor Muda di lingkungan Kementerian Pertahanan.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Program Magister Politeknik STIA LAN Jakarta khususnya konsentrasi MKN.
10. Seluruh pihak yang turut membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini yang peneliti tidak dapat sebutkan satu per satu. Terima kasih semuanya.

Pada Akhirnya, sebagai hasil buah pemikiran manusia, tesis ini pastinya masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu, masukan, kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan untuk kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan nilai tambah bagi pengembangan akuntansi dan pelaporan keuangan bagi Kementerian Pertahanan pada umumnya dan bagi Inspektorat Jenderal Kemhan pada Khususnya.

Jakarta, Juni 2022

S.H. Prasetyo

ABSTRAK

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit Atas Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Safwatullah Hari Prasetyo
prasetyomarinir@gmail.com
Politeknik STIA LAN Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit atas Laporan Keuangan Kemhan dan TNI. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap 14 informan, observasi dan penelaahan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Kualitas Laporan keuangan Kemhan dan TNI ditinjau dari aspek karakteristik kualitatif sudah baik dengan diperolehnya opini wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun masih terdapat kelemahan-kelemahan khususnya pada aspek sistem pengendalian internal (SPI) dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku yang berdampak pada kualitas Laporan Keuangan Kemhan dan TNI. Dari hasil Penelitian menunjukkan terdapat 2 (dua) aspek yang mempengaruhi Kualitas Audit Atas Laporan Keuangan Kemhan dan TNI, pertama adalah Kompetensi auditor dan yang kedua adalah Independensi auditor yang sangat memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas audit atas laporan Keuangan Kemhan dan TNI. Untuk meningkatkan kompetensi dan Independensi agar Irjen Kemhan melakukan penilaian kinerja auditor dan pejabat SPI satker berdasarkan laporan hasil audit, rekomendasi dan tindak lanjut atas rekomendasi temuan beserta upaya-upayanya.

Kata kunci: kualitas laporan keuangan; kualitas audit; kompetensi; independensi.

ABSTRACT

The Affecting Factors of the Quality of Audit on the Financial Statements of the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia

Safwatullah Hari Prasetyo
prasetyomarinir@gmail.com
NIPA – School of Administration
Jakarta, Indonesia

This study aims to explain the affecting factors of the quality of audit on the financial statements of the Ministry of Defense and the Indonesian National Army (TNI). The method used is a qualitative research method with a case study approach, while the data were collected through interviews with 14 informants, observation and document review. The results showed that in general, the quality of the financial statements of the Ministry of Defense and the Indonesian Armed Forces (TNI) in terms of qualitative characteristics was good with the obtaining of an Unqualified Opinion (WTP) from the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK), but there were still weaknesses, especially in the aspects of the internal control system (SPI), and the compliance with the laws and regulations which have impacts on the quality of the Financial Statements of the Ministry of Defense and the Indonesian National Army (TNI). The results of the study indicate that there are 2 (two) aspects that affect the Quality of Audit on Financial Statements of the Ministry of Defense and the Indonesian Armed Forces (TNI), which are (1) the competence of the auditors and (2) the independence of the auditors in improving the quality of audit on the financial statements of the Ministry of Defense and the Indonesian Armed Forces (TNI). In order to improve the competence and independence, the Inspector General of the Ministry of Defense has conducted performance assessments on the auditors and auditee officials (SPI) based on the audit reports, recommendations and the follow-up on the recommendations and findings including all the relevant efforts.

Keywords: financial statements quality; audit quality; competence; independence

DAFTAR TABEL

Nomor	Uraian	Hal
Tabel 1.1	Klasifikasi kondisi temuan APIP	8
Tabel 1.2	Rincian klasifikasi penyebab temuan audit APIP	10
Tabel 3.1	Rincian Responden Penelitian	46
Tabel 4.1	Rincian Klasifikasi Kondisi temuan APIP	62
Tabel 4.2	Rincian klasifikasi penyebab Temuan Hasil audit APIP	62
Tabel 4.3	Laporan Realisasi Anggaran	66
Tabel 4.4	Obyek pemanfaatan aset pada Kemhan dan TNI	77
Tabel 4.5	Daftar Susunan Personil (DSP) Jabatan Fungsional Itjen Kemhan	84
Tabel 4.6	Jenjang Pendidikan Auditor Itjen Kemhan TA. 2021	85
Tabel 4.7	Sertifikasi Auaditor Itjen Kemhan tahun 2021	87

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Uraian	Hal
Gambar 1.1	Prosentase Temuan APIP Tahun 2020	9
Gambar 1.2	Prosentase Penyebab Temuan APIP Tahun 2020	10
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	42
Gambar 3.1	Model Analisa Data	47
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Itjen Kemhan	53
Gambar 4.2	Ringkasan Laporan Keuangan	57
Gambar 4.3	Struktur Organisasi Kemhan	90

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Uraian
APBD	Anggaran Pendapatan Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan Negara
APIP	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
ASN	Aparat Sipil Negara
BMN	Barang Milik Negara
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DSP	Daftar Susunan Personil
IAI	Ikatan Akuntan Indonesia
IKU	Indikator Kinerja Utama
ISA	International Standards on Auditing
JFA	Jabatan Fungsional Auditor
JUKLAK	Petunjuk Pelaksanaan
JUKNIS	Petunjuk Teknis
KABAG	Kepala Bagian
KASUBBAG	Kepala Sub Bagian
KEMHAN	Kementerian Pertahanan
KSAP	Komite Standar Akuntansi Pemerintah
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
LKBUN	Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LKJIP	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
LKKL	Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga
LKPP	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
MABES	Markas Besar
OP	Obyek Pemeriksaan
PA PK	Perwira Prajurit Karier
PERIRJEN	Peraturan Irjen Kemhan
PERMENHAN	Peraturan Menteri Pertahanan
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PP	Peraturan Pemerintah
PSM	Pernyataan Standar Mutu
SAP	Standar Akuntansi Pemerintah
SATKER	Satuan Kerja
SDM	Sumberdaya Manusia

SES	Sekretaris
SOP	Standar Operasional Prosedur
SPI	Sistem Pengendalian Intern
SPIP	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPKN	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
TMP	Tidak Memberikan Pendapat
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TOA	<i>Tour Of Area</i>
TOD	<i>Tour Of Duty</i>
TW	Tidak Wajar
UO	Unit Organisasi
UU	Undang-undang
WASRIK	Pengawasan dan Pemeriksaan
WDP	Wajar dengan pengecualian
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian

POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
BAB I	1
PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Rumusan Permasalahan.....	13
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	14
BAB II	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis.....	17
B.1 Tinjauan Kebijakan.....	17
B.2 Tinjauan Teori.....	21
C. Kerangka Berfikir	40
BAB III	43
METODOLOGI PENELITIAN	43
A. Metode Penelitian.....	43

B. Teknik Pengumpulan Data.....	44
C. Teknik Pengolahan Data.....	47
D. Instrumen Penelitian	49
BAB IV.....	50
PEMBAHASAN.....	50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
B. Hasil Penelitian	54
1. Keuangan Negara	54
2. Kriteria Kualitas Audit Laporan Keuangan Negara.	59
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Audit Internal.....	80
BAB V	92
SIMPULAN DAN SARAN.....	92
A. Simpulan.....	92
B. Saran	94
Daftar Pustaka	99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	106



STIA LAN

J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan terhadap informasi keuangan yang berkualitas merupakan suatu kebutuhan yang mutlak bagi masyarakat dan dunia usaha. Standar Akuntansi Internasional yang berlaku di banyak negara memaksa pemerintah Indonesia untuk segera melakukan perubahan mendasar di bidang akuntansi yang selama ini berlaku dengan adanya perubahan ini menuntut adanya penyesuaian standar akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara Internasional. Reformasi birokrasi terhadap standar akuntansi mutlak menjadi sangat penting dan harus segera diperbaiki.

Salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah Laporan keuangan negara. Reformasi tahun 1998 merupakan sejarah dimulainya reformasi birokrasi di Indonesia. Sudah saatnya birokrasi pemerintah dirombak secara besar-besaran, terutama dalam hal penyaluran dan pengeluaran anggaran negara, dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran. Untuk menjamin kemampuan pemerintah memberikan pelayanan dan informasi pengelolaan keuangan yang diinginkan oleh masyarakat.

Masyarakat menuntut agar pemerintah transparan dalam pengelolaan sumberdaya publik salahsatunya melalui pelaporan keuangan sebagai sarana informasi penggunaan uang negara dan sarana bagi masyarakat (*Stakeholder*) untuk mengevaluasi kinerja pemerintah. Pemerintah wajib memberikan informasi secara terbuka dan jujur karena pada dasarnya masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui pengelolaan uang negara

yang dipercayakan pada pemerintah sesuai peraturan yang berlaku. Laporan keuangan yang berkualitas sangat berguna untuk evaluasi pencapaian kinerja yang direncanakan seperti pembiayaan program kegiatan sesuai fungsinya, keekonomisan, keefektifan dan keefisienan pelaksanaan program pemerintah serta mengevaluasi kemanfaatan dan tingkat pemerataan suatu program yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam pelayanan publik.

Dalam proses perubahan ini, pemerintah dihadapkan beberapa krisis yang dihadapi saat ini dan hambatan yang dihadapi suatu negara yang ingin merubah sistem akuntansinya antara lain:

1. Terjadinya kegagalan dalam pengembangan prinsip akuntansi dalam pemerintah khususnya dalam pertanggungjawaban keuangan menjadi sorotan masyarakat dalam pelayanan terhadap masyarakat, adanya ketidakpercayaan dari masyarakat menurunkan kredibilitas pemerintah dimata masyarakat.
2. Masyarakat menghendaki terciptanya birokrasi yang baik melalui terciptanya laporan keuangan yang berkualitas, transparan, terukur dan akuntabel.
3. Perubahan yang mendasar dalam akuntansi pemerintah belum didukung perubahan *mainset* pegawai baik dari tingkatan terendah sampai dengan yang tertinggi karena masih melekatnya paradigma lama dalam pelaksanaan akuntansi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik.
4. Dalam perubahan selalu terjadi GAP antara yang mendukung dan yang tidak, untuk itu penerapan dalam perubahan akuntansi pemerintah harus tetap dalam pengawasan dan pendampingan, untuk itu sangat dibutuhkan agen perubahan disetiap lini dalam birokrasi Pemerintah.
5. Kesiapan sumberdaya organisasi juga tidak kalah penting dalam proses perubahan terutama adalah kesiapan sumberdaya manusia yang kompeten dan mampu menerapkan perubahan dengan baik.

Untuk menjawab tuntutan masyarakat tersebut maka pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan antara lain:

- a) Merupakan Kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk terhindar dari kasus KKN yang selama ini menghantui birokrasi pemerintah menunjukkan komitmen pemerintah dengan disahkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih.
- b) Disahkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dengan digulirkannya undang-undang ini maka peraturan terhadap manajemen keuangan negara mengalami perubahan sebagai bentuk dari proses reformasi birokrasi dibidang akuntansi publik.
- c) Disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dengan berlakunya peraturan ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap penataan Keuangan Negara dan penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan Negara (APBN).

Untuk menjaga mutu dan menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan, Pemerintah mengeluarkan peraturan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tersebut melalui ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang memuat beberapa karakteristik laporan keuangan sebagai berikut:

1. Relevan, dalam arti akun keuangan yang diberikan harus memberikan umpan balik dan proyeksi dalam pengambilan keputusan.
2. Andal, artinya laporan yang disampaikan tidak memuat ketidakakuratan yang serius yang dapat merugikan negara.
3. Sebanding, artinya laporan tersebut sebanding dengan laporan sejenis dalam sesuai format, waktu (periodisitas), dan substansi yang dilaporkan.
4. Dapat dipahami, menunjukkan bahwa laporan yang diberikan dapat dimengerti dan dipahami oleh konsumen pelaporan dan memberikan informasi yang cukup tentang isi laporan keuangan.

Dengan disahkannya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP, maka seluruh Kementerian/Lembaga/tingkat dan Kepala Daerah wajib untuk membuat laporan dan informasi atas pelaksanaan Keuangannya dan dalam penyusunannya harus tersedia tepat waktu, sesuai standar Penyusunan SAP (KSAP) *Government Accounting Standards Committee (GASC)*.

Melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, pemerintah mengamanatkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagai lembaga independen pemerintah yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan ini dilaksanakan dan memeriksa pertanggungjawaban keuangan pemerintahan pusat, yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat kementerian dan Lembaga (LKKL), Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan pada akhirnya bermuara pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Dalam pelaksanaan tugasnya, BPK mengeluarkan pedoman dalam standar pemeriksaan keuangan negara melalui Peraturan BPK nomor 1 Tahun 2007 tentang standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN), dalam peraturan ini menjelaskan beberapa aspek penilaian dalam menentukan opini BPK atas laporan keuangan, antara lain sebagai berikut:

1. Ketaatan terhadap SAP, sebagai sumber referensi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, diperlukan kepatuhan terhadap SAP.
2. Pengungkapan yang memadai, untuk menilai apakah penyajian pertanggungjawaban keuangan dapat memenuhi aspek-aspek yang telah ditentukan dalam SAP.
3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan anggaran di kementerian/lembaga.
4. Efektivitas sistem pengendalian intern (SPI), untuk menilai apakah sistem pengendalian internal pemerintah telah berjalan untuk mengelola resiko mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan pemerintah.

Untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas, disamping pemerintah mengatur ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh seluruh kementerian/lembaga/setingkat dan kepala daerah yang diperiksa dan diawasi oleh BPK sebagai badan independen pemerintah dalam pemeriksaan keuangan negara, Pemerintah juga melakukan perkuatan dalam intern entitas melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan disahkannya PP nomor 60 tahun 2008. SPIP adalah suatu proses tindakan dan kegiatan yang berkesinambungan yang dilakukan oleh tim manajemen dan seluruh pegawai untuk memberikan jaminan yang optimal bagi terlaksananya tujuan organisasi. Dengan berlakunya PP nomor 60 tahun 2008 memberi kewenangan kepada BPKP, Inspektorat Kementerian/lembaga setingkat sebagai Aparat pengawas intern Pemerintah (APIP) untuk mengawasi pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan dalam program kerja dan anggaran kementerian/lembaga.

Pengawasan melekat oleh APIP menggunakan berbagai metode antara lain audit, review, evaluasi, dan monitoring. Akibatnya, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan dibebani tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja Unit Organisasi (UO) Kemhan untuk memberikan keyakinan atas laporan keuangan UO Kemhan sebelum disetujui oleh Kepala Unit Organisasi .
2. Kedua, melakukan audit pendahuluan sebelum diajukan untuk disetujui oleh Unit Organisasi (UO) Kementerian Pertahanan.
3. Melakukan post audit kinerja keuangan dan operasional Satker Kemhan.
4. Melakukan review terhadap pengelolaan PNBK Kemhan dan TNI.
5. Melakukan tinjauan kinerja dan Satker/Subsatker pada setiap akhir tahun anggaran untuk melihat faktor apa yang berkontribusi terhadap keberhasilan dan kegagalan suatu kegiatan.
6. Suatu program atau kegiatan harus dipantau secara ketat sepanjang tahun fiskal, dan setiap temuan dari pemantauan tersebut harus dilaporkan kembali kepada manajemen.

7. Sosialisasi pengawasan, pelatihan dan pendidikan pengawasan, serta pendistribusian hasil pengawasan perlu dilakukan lebih lanjut.
8. Menyusun rencana kerja dan melaporkan secara berkala kepada Sekjen tentang pelaksanaan SPIP di Satker/Subsatker, dengan tembusan kepada pimpinan terkait.

Untuk melaksanakan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, maka Kementerian Pertahanan Republik Indonesia segera melakukan perubahan khususnya terhadap peningkatan kualitas laporan Keuangan Kemhan dan TNI, salahsatunya dengan cara meningkatkan sistem pengendalian internal (SPI) di Lingkungan Kemhan dan TNI melalui Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 21 Tahun 2010, dengan adanya peraturan tersebut memberikan tugas dan tanggungjawab serta kewenangan kepada Inspektorat Jenderal Kemhan sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan di Lingkungan Kemhan dan TNI, Menteri Pertahanan juga mengeluarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Standart Audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Lingkungan Kemhan dan TNI, dengan adanya peraturan ini diharapkan kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan di Lingkungan Kemhan dan TNI dapat diperbaiki dan dapat memberikan laporan yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hal ini merupakan tantangan yang besar bagi Itjen Kemhan untuk menjawab tuntutan perubahan atas akuntansi pemerintah tersebut, Itjen Kemhan diharapkan mampu menjadi agen perubahan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan Kemhan dan TNI, bertindak sebagai penjamin kualitas (*Quality Assurance*) yaitu memberikan keyakinan yang memadai kepada stakeholder bahwa laporan yang diberikan adalah laporan yang berkualitas. Itjen Kemhan juga dituntut mampu bertindak sebagai pendampingan dalam pengelolaan anggaran (*Consulting Partner*) yang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi disatuan pelaksana dan yang tidak kalah

pentingnya adalah mewujudkan Itjen Kemhan sebagai sistem peringatan dini (*Early Warning System*) atas terjadinya kesalahan, pelanggaran dalam pengelolaan Keuangan Negara.

Organisasi yang baik juga harus memperhatikan sumber daya manusia yang ada di organisasinya demi terciptanya visi dan misi organisasi. Sumber daya manusia dapat memajukan suatu organisasi. Suatu organisasi selalu menuntut agar sumber daya manusia dapat loyal terhadap organisasi. Sumber daya manusia yang dikelola dengan baik akan meningkatkan efisiensi serta menguatkan organisasi. Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas maka dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi dan dapat menerapkan budaya organisasi dengan terus berusaha melakukan pengembangan diri secara maksimal demi tercapainya tujuan organisasi.

Dalam pelaksanaannya, penyusunan laporan keuangan Kemhan dan TNI belum dilaksanakan secara optimal, meskipun dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2019-2021 Kementerian Pertahanan mendapatkan opini tertinggi yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun masih ditemukan sejumlah kesalahan dan temuan audit terkait pelaksanaan anggaran negara. Dari data LHP BPK atas LK Kementerian Pertahanan periode 2019-2021 menunjukkan bahwa jumlah temuan pemeriksaan mengalami tren peningkatan, dimana jumlah temuan pada aspek SPI berjumlah 10 temuan pada tahun 2019, berjumlah 11 temuan pada tahun 2020 dan berjumlah 12 temuan pada tahun 2021. Hal yang sama terjadi pada temuan pemeriksaan pada aspek kepatuhan perundang-undangan, berjumlah 8 temuan pada tahun 2019, berjumlah 9 temuan pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 berjumlah 10 temuan. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi permasalahan terkait penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang belum dilaksanakan dengan baik.

Dari observasi pra penelitian, kegiatan sistem pengendalian intern yang meliputi kegiatan pengadministrasian, penatausahaan, dan pengelolaan keuangan negara belum efektif dan belum sepenuhnya mematuhi peraturan yang berlaku, masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu menjadi perhatian khusus pemerintah, karena sejak tahun 2017 pemerintah telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) yang menjamin bahwa pernyataan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan baik di tingkat LKKL maupun LKPP ditandatangani oleh menteri/kementerian yang menyatakan bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, namun di lapangan sebenarnya mencerminkan apa yang sebaliknya. Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP mengamanatkan bahwa seluruh pegawai di semua level diwajibkan untuk berpartisipasi dalam siklus SPI yang berkesinambungan.

Hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan TA. 2020 dapat dipetakan 4 (empat) permasalahan yang menonjol berdasarkan klasifikasi kondisi temuan oleh APIP, dapat dilihat berikut ini:

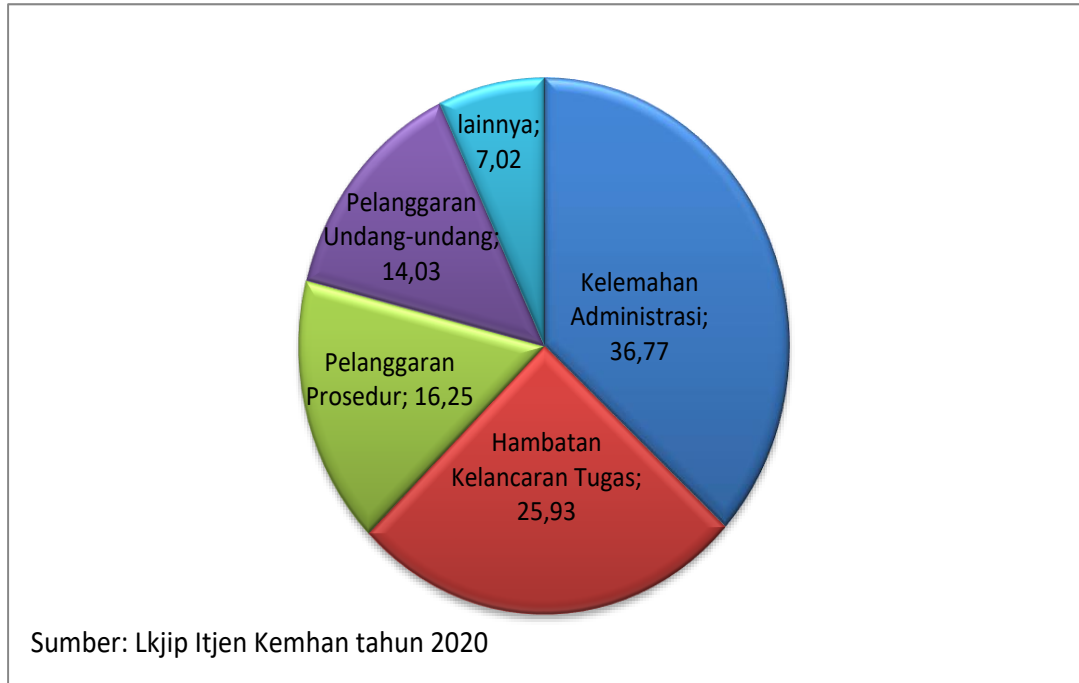
Tabel 1.1

Klasifikasi Kondisi Temuan APIP Tahun 2020

Klasifikasi	Temuan	Prosentase
Kelemahan Administrasi	207	36,77 %
Hambatan dalam kelancaran tugas	146	25,93 %
Pelanggaran Prosedur	93	16,25 %
Pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku	79	14,03 %

Sumber: Lkijp Itjen Kemhan tahun 2020

Gambar 1.1
Prosentase Temuan APIP Tahun 2020



Dilihat dari tabel diatas temuan APIP pada tahun 2020, menunjukkan bahwa terdapat Kelemahan administrasi 207 (dua ratus tujuh) temuan (36,77%) dan Hambatan terhadap kelancaran tugas 146 (seratus empat puluh enam) temuan (25,93%). Hal ini mengindikasikan terjadi permasalahan yang diduga disebabkan kurangnya kompetensi pengawak/operator terkait penyusunan laporan keuangan. Dari data Tabel 1.1 tentang rincian klasifikasi kondisi temuan APIP Tahun 2020 juga menjelaskan bahwa terjadi pelanggaran Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebanyak 79 temuan (14,03%) yang mengindikasikan terjadi permasalahan terkait implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melihat Penyebab dari temuan hasil audit APIP TA. 2020 dapat dilihat pada tabel 1.2 tentang 4 (empat) penyebab menonjol terjadinya temuan APIP sebagai berikut:

Tabel 1.2

Rincian Klasifikasi Penyebab Temuan Audit APIP Tahun 2020

Penyebab	Jumlah Kejadian	Prosentase
Kelemahan Prosedur	192	37,35 %
Kelemahan pencatatan dan pelaporan	109	21,21 %
Kelemahan Kebijakan	93	18,09 %
Kelemahan dalam Reviu	57	11,09 %

Sumber: Lkijp Itjen Kemhan Tahun 2020

Gambar 1.2

Prosentase Penyebab Temuan APIP Tahun 2020



Sumber:Lkijp Itjen Kemhan Tahun 2020

Dari data penyebab tersebut di atas menunjukkan bahwa penyebab penyimpangan/kelemahan yang paling menonjol adalah Kelemahan dalam prosedur 192 (seratus sembilan puluh dua) kasus (37.35%), Kelemahan dalam pencatatan dan pelaporan 109 (seratus sembilan) kasus (21,21%) dan Kelemahan dalam Reviu yang merupakan salah satu tugas dari APIP juga memberikan kontribusi yang cukup besar dengan 57 kasus (11,09%), Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern (SPI) belum berjalan efektif sesuai dengan yang diharapkan.

Dari Aspek Kecukupan pengungkapan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 143/PMK/V/2018 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran di Lingkungan Kemhan dan TNI juga belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari hasil pengamatan pra studi menunjukkan bahwa sistem penghitungan dan pembayaran untuk biaya perjalan dinas masih menggunakan indek Standar biaya umum (SBU) yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, padahal nominal yang ada dalam SBU adalah indek maksimal yang diijinkan dan sesuai peraturan yang berlaku seharusnya penghitungan biaya perjalanan dinas harus sesuai dengan yang dikeluarkan oleh pejalan (*at cosh*) berdasarkan bukti sah biaya yang dikeluarkan bukan sesuai indek yang ada dalam SBU.

Hasil prastudi terhadap dokumen kepegawaian dari Sub Bagian Administrasi personel Itjen Kemhan tahun 2021, dilihat dari tataran kompetensi SDM yaitu salah satunya adalah latar belakang pendidikan. Para auditor di Itjen Kementerian Pertahanan cukup heterogen, mayoritas auditor berlatar belakang pendidikan nonekonomi yang berkisar pada angka 60% dan sebagian besar belum memiliki sertifikasi yang dibutuhkan sebagai seorang auditor intern. Hal ini serupa hasil penelitian Dewi Amalia (2017, p.135) sertifikasi jabatan fungsional auditor (JFA) dan sertifikasi lain yang menunjang tugas dalam pengawasan intern pemerintah sangat penting

dan harus dilakukan melalui pelatihan dan pelatihan secara berjenjang dan berkelanjutan sesuai kebutuhan penugasan auditor dilingkungan kerjanya.

Dari pengamatan di lapangan, Independensi Auditor Internal belum dapat dilaksanakan secara maksimal, sehingga berakibat pada menurunnya kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor internal di Lingkungan Kemhan dan TNI. Hal ini senada dengan pendapat Supriyono (1988) dalam Queena et.al (2012, p. 3) yang menyatakan bahwa kualitas audit sangat dipengaruhi oleh independensi auditor, jika auditor kehilangan independensinya maka hasil audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dari uraian data di atas, penelitian ini mencoba menelusuri lebih jauh terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit atas laporan keuangan Kementerian Pertahanan dengan fokus penelitian kepada SPI karena dengan efektifnya pelaksanaan SPI maka akan meningkatkan kualitas audit atas laporan keuangan Kemhan dan TNI. Peneliti berharap dapat memberikan gambaran secara ilmiah bagaimana kualitas audit atas laporan keuangan Kementerian Pertahanan, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan menjadi landasan dalam meningkatkan kualitas audit atas laporan keuangan serta memitigasi elemen yang mungkin berdampak pada kualitas audit laporan keuangan Kemhan dan TNI.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan prastudi terhadap LHP BPK atas LK Kementerian Pertahanan dan TNI TA. 2019-2021, menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yang berkaitan dengan kualitas audit atas laporan keuangan Kemhan dan TNI, sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Kemhan dan TNI belum sepenuhnya memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) .
2. Kecukupan pengungkapan pertanggungjawaban atas laporan keuangan Kemhan dan TNI belum memadai.

3. Laporan Keuangan Kemhan dan TNI belum sepenuhnya patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan temuan terkait hal tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2019-2021.
4. Sistem pengendalian Intern (SPI) atas pengelolaan anggaran pada Kemhan dan TNI belum efektif seperti yang diharapkan
5. Kompetensi sebagai auditor yang dimiliki oleh Inspektorat Jenderal Kemhan saat ini belum optimal dilihat dari *kuntitas* dan *kualitas* auditor.
6. Independensi Auditor dalam melaksanakan tugasnya belum dapat diimplementasikan dengan baik, dilihat dari komitmen pimpinan dan dari individual auditor sendiri.

C. Rumusan Permasalahan

Berikut ini adalah masalah utama yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Apakah dalam melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemhan dan TNI sudah memenuhi terhadap Standar Pemeriksaan Keuangan Negara?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas audit atas laporan keuangan Kemhan dan TNI?
3. Bagaimana cara meningkatkan kualitas audit atas laporan keuangan Kemhan dan TNI?

D. Tujuan Penelitian

Dari Rumusan masalah pada penelitian diatas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kualitas pemeriksaan yang dilakukan oleh Irjen Kemhan terhadap keuangan Kemhan dan TNI sesuai dengan SKPN yang diterbitkan oleh BPK RI.

2. Mengidentifikasi dan mengkaji unsur-unsur yang mempengaruhi kualitas audit dalam pengelolaan anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI.
3. Memberikan alternatif *problem solving* atau solusi untuk meningkatkan kualitas audit atas laporan keuangan Kemhan dan TNI.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini antara lain:

1. Dari aspek teoritis, hasil penelitian ini dapat mengisi kesenjangan yang ada terhadap literatur terkait kualitas audit oleh auditor internal Itjen Kemhan. Di samping itu sebagai dukungan peneliti terhadap pengembangan ilmu akuntansi dan pelaporan keuangan khususnya pada aspek Kualitas audit pada kementerian dan lembaga.
2. Untuk tujuan praktis, penulis berharap bahwa temuan mereka dapat membantu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan menentukan bagaimana elemen yang mempengaruhi kualitas audit dapat sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan kualitas audit untuk menghasilkan laporan keuangan Kemhan dan TNI.